
**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN
PENDAPATAN DI PULAU JAWA 2009-2021**

Oleh
Siti Marti'ah
Universitas Indraprasta PGRI
Email: Sitimartiah1@gmail.com

Abstrak

Ketimpangan pendapatan akan menjadi masalah karena memunculkan dampak lanjutan dibidang politik, sosial maupun ekonomi, diantaranya terhadap penduduk dengan tingkat kemiskinan rendah dan pelambatan laju pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan terjadi lebih tinggi pada daerah yang baru memulai pembangunannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan verifikatif untuk mengetahui hubungan antar variabel Kepadatan Penduduk, Pengangguran, IPM, Inflasi, PMTB dan IP_TIK terhadap Ketimpangan Pendapatan. Analisis menggunakan Regresi Data Panel dengan sampel data berasal dari 6 provinsi di pulau jawa selama tahun 2009 sampai dengan 2021. Faktor terbesar yang mempengaruhi ketimpangan secara parsial dipulau jawa adalah Pengangguran dengan arah hubungan positif dan berikutnya adalah IPM dengan arah hubungan positif. Ketika seorang memiliki keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja maka ia akan terpakai bahkan dengan pendapatan terbaik dan sebaliknya ketika individu tidak memenuhi keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja maka pendapatannya terbatas, hal-hal inilah yang menyebabkan merubahan pada ketimpangan pendapatan. Jika pengambil kebijakan fokus meningkatkan pada angka IPM tanpa menyediakan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja maka ketimpangan pendapatan akan semakin meingkat.

Kata Kunci : *Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, IPM, Jawa*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari lima pulau besar dan ribuan pulau lainnya. Berdasarkan luas wilayah maka pulau Papua sebagai pulau terluas di Indonesia dilanjutkan dengan pulau Kalimantan, pulau ketiga adalah Pulau Sumatera dilanjutkan dengan pulau Sulawesi dan pulau kelima adalah pulau Jawa. Namun berbanding terbalik dengan luas wilayah pulau, tepatnya pada tahun 2022 posisi pertama provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak berada di pulau Jawa yaitu provinsi Jawa Barat (Statistik Indonesia.2023) yaitu sejumlah 49.405.800 penduduk sedangkan jumlah penduduk di pulau terluas yaitu Provinsi Papua sejumlah 4.418.600 penduduk dan Provinsi Papua Barat Sejumlah 1.183.300 penduduk. Ketika membandingkan luas wilayah dengan jumlah penduduk maka akan diperoleh tingkat kepadatan penduduk

dimana menurut laporan statistik Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 diketahui 3 provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi berada pulau Jawa yaitu 1) DKI Jakarta yaitu 16.158 per KM² 2) Jawa Barat yaitu 1.334 per KM² dan 3) Banten yaitu 1.310 per KM².

Kepadatan penduduk disuatu wilayah akan menjadi modal berharga atau beban bagi pemerintah diwilayah tersebut, provinsi dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kondisi ekonomi yang baik atau memiliki angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tinggi maka keberadaan penduduk akan menjadi modal. Namun jika IPM penduduk di provinsi tersebut memiliki nilai rendah maka akan menjadi beban yang dapat menimbulkan pengangguran dan akhirnya mempengaruhi kondisi

perekonomian. Peningkatan jumlah penduduk menjadi masalah yang sering dihadapi negara berkembang yang terlihat dalam masalah ketidakmerataan dan ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan merupakan sebuah problem bagi negara-negara, baik dinegara maju maupun di negara berkembang. Dampak dari ketimpangan pendapatan mempengaruhi kelangsungan pembangunan. (Pendapatan, Daerah, Di, & Magelang, 2019). Pengukur atau evaluasi ketimpangan pendapatan dilakukan dengan 2 konsep yaitu ketimpangan absolut dan relatif. Konsep ketimpangan absolut adalah model pengukuran pertidaksamaan dengan menggunakan parameter yang memiliki nilai mutlak. Di sisi lain, konsep ketimpangan relatif adalah konsep dengan membandingkan jumlah pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok dengan semua pendapatan seluruh masyarakat.

Ketimpangan pendapatan akan menjadi masalah karena memunculkan dampak lanjutan dibidang politik, sosial maupun ekonomi, diantaranya terhadap penduduk dengan tingkat kemiskinan rendah dan pelambatan laju pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan terjadi lebih tinggi pada daerah yang baru memulai pembangunannya.

Ketidakmerataan juga terjadi antar pulau dan antar provinsi yang merupakan motor penggerak perekonomian karena ketimpangan salah satunya dilihat dari perbedaan tingkat PDRB perkapita antar wilayah. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat tidak hanya berdampak pada masalah pemerataan, tetapi juga kualitas dan relevansi penduduk terutama dari segi dunia kerja yaitu mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan suatu daerah. Dengan bertambahnya populasi maka daya tampung lapangan pekerjaan harus memadai agar tidak terjadi tingginya angka pengangguran. Masalah ketenagakerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya penambahan jumlah angkatan kerja sedangkan kesempatan kerja yang terbatas sehingga timbulah pengangguran. Semua ini berkaitan dengan isu-

isu seperti ketidakmerataan pendapatan, kemiskinan, melambatnya pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, serta instabilitas politik

2. LANDASAN TEORI

Gini Rasio merupakan salah satu indikator untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan disebuah negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan dan sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka ketimpangan pendapatan juga demikian. (Todaro & Smith, 2015).

Teori ketimpangan distribusi pendapatan dimulai sejak munculnya suatu hipotesis yaitu hipotesis “U-terbalik” dikemukakan oleh Simon Kuznet tahun 1955. Kuznet (1955) menyatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan makin merata.

Terdapat dua model ketimpangan yaitu teori menurut Harrod Domar dan teori aliran Neo-klasik. Kedua teori tersebut memberikan peranan khusus pada peranan modal yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik modal kedalam daerahnya. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh sekaligus akan menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan pada daerah yang mampu menghasilkan pengembalian (return) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi

investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara.

David Ricardo (1817) menjelaskan bahwa ketika terjadi pertumbuhan penduduk maka akan lebih banyak pekerjaan yang timbul, hal ini menyebabkan upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Teori Pertumbuhan Klasik David Ricardo telah menyempurnakan Teori Klasik Smith menjadi model yang lebih tajam secara konseptual maupun dari segi mekanisme proses pertumbuhan ekonomi. Ricardo menjelaskan ketika keterbatasan lahan maka pertumbuhan penduduk menyebabkan produk marginal (*marginal product*) semakin menurun yang dikenal dengan *the law of diminishing return*. Kemajuan teknologi adalah salah satu cara untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dimana kedua kekuatan dinamis yang saling tarik menarik dan akhirnya dimenangkan oleh *the law of diminishing return*. berdasarkan teori ini perekonomian akan terbatas akibat keterbatasan tanah (Budiono, 1982).

Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dimana total penduduk dalam suatu batas ruang tertentu semakin naik dibandingkan dengan luas suatu ruangan (Belakang, 2003). Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara total penduduk dengan luas pemukiman. Kepadatan penduduk salah satu parameter dari tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dinyatakan dalam jumlah penduduk per kilometer persegi dan dibandingkan dengan daerah pemukiman. Dalam suatu wilayah kepadatan penduduk dibagi menjadi empat bagian (Kajian Kependudukan, 2015):

- a. *Crude density of population* atau kepadatan penduduk kasar disebut kepadatan penduduk aritmatika yang di tunjukkan dengan jumlah penduduk per kilometer persegi luas wilayahnya.
- b. *Physiological density* atau kepadatan yang menunjukkan jumlah penduduk per

kilometer persegi lahan pertaniannya (*cultivable land*).

- c. *Agricultural density* (kepadatan penduduk agraris) yaitu jumlah penduduk petani per kilometer persegi wilayah *cultivable land*.
- d. *Economical density of population* (kepadatan penduduk ekonomis) merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan daya tampung. Ledakan penduduk yang cepat berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di bidang sosial ekonomi.

Delapan faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan disuatu daerah: (1) Jika pertumbuhan penduduk meningkat secara signifikan mengakibatkan pendapatan perkapita menurun (2) Inflasi dimana pemasukan moneter meningkat, yang tidak sebanding dengan peningkatan produksi barang-barang. (3) pembanguna yang tidak merata antar wilayah. (4) investasi proyek padat modal yang tinggi. (5) pergerakan sosial yang minimum. (6) Penerapan garis haluan impor berdampak pada naiknya harga barang hasil industri guna melindungi perusahaan-perusahaan kapitalis. (7) rendahnya *kurs* mata uang (8) Rusaknya industri Rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variable kepadatan penduduk, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi (IP_TIK) secara simultan dan parsial terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Jawa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan verifikatif untuk mengetahui hubungan antar variabel X_1 (Kepadatan Penduduk), X_2 (Pengangguran), X_3 (IPM), X_4 (Inflasi), X_5 (PMTB) dan X_6 (IP_TIK) terhadap Y (Ketimpangan Pendapatan).

Analisis akan dilakukan menggunakan Regresi Data Panel. Penentuan Model estimasi menggunakan data panel dilakukan tiga

pendekatan, antara lain: 1) PLS (*Pooled Least Square*) atau CEM (*Common Effect Model*), 2) FEM (*Fix Effect Model*) dan 3) REM (*Random Effect Model*). Penentuan penggunaan model terbaik dilakukan dengan tiga pengujian (Basuki, 2019; Brandler & Roman, 2020) yaitu :

- 1) Uji Chow atau *Chow Test* yaitu Pengujian Uji statistik F dengan pengujian *Redundant Fixed effect – Likelihood ratio*, dimana untuk memilih terbaik antara CEM dan FEM (Baltagi, 2005). Apabila nilai prob. $F < \text{batas kritis}$, memilih FEM, Namun jika nilai prob. $F \geq \text{batas kritis}$, maka pilihannya CEM.
- 2) Uji Hausman atau *Hausman test* adalah pengujian statistik untuk memilih antara FEM dan REM jika nilai prob, *chi square* < taraf signifikansi, maka memilih FEM, namun jika prob. *Chi square* \geq taraf signifikansi, maka memilih REM.
- 3) Uji Lagrange Multiplier adalah uji di lakukan jika model yang di pilih saat uji *Likelihood ratio* adalah CEM. Maka untuk menentukan yang terbaik diantara CEM dan REM dilakukan uji LM. Uji ini jika nilai *p value* < batas kritis, maka memilih REM, Namun jika Nilai *p value* \geq batas kritis, maka memilih CEM sebagai model terbaik.

Data panel di 6 Provinsi di pulau Jawa dengan populasi seluruh data kepadatan penduduk, pengangguran, indek pembangunan manusia (IPM), inflasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi (IP_TIK) dan ketimpangan pendapatan selama 13 (tiga belas) tahun dimulai dari 2009 sampai dengan 2021. Data penelitian adalah diperoleh dari berbagai instansi yaitu Bank Indonesia, Dinas Kependudukan, Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Daerah serta lembaga lainnya.

Ketimpangan Pendapatan = Y sebagai fungsi variabel terikat dan merupakan variabel yang dipengaruhi secara simultan oleh faktor-faktor penentu, maka :

Model penelitian $Y =$

$f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$

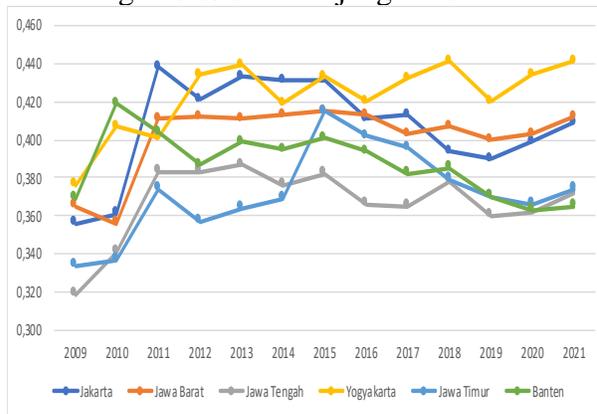
Persamaan Model Panel $Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \varepsilon_{it}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan deskriptif dilakukan dengan membahas kondisi dari setiap variabel selama periode penelitian atau sejak tahun 2009-2021, yaitu

- 1) Variabel kepadatan penduduk tertinggi berada di Provinsi Jakarta pada tahun 2021 sebanyak 15.978/Km² dan terendah di Provinsi Jawa Timur di tahun 2009 sebanyak 727/Km² serta angka rata-rata mencapai 3.437/km selama kurun waktu 13 tahun di 6 provinsi dipulau Jawa.
- 2) Variabel pengangguran tertinggi 14,97 % di provinsi Banten pada tahun 2009 dan terendah pada tahun 2016 dengan angka 2,72% di Provinsi Yogyakarta. Rata rata pengangguran yang ada di pulau jawa adalah 7.11% dimana angka ini lebih tinggi dari angka rata rata pengangguran yang ada di Indonesia selama 13 tahun penelitian.
- 3) Variabel Indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi sebesar 81,11% pada tahun 2021 di provinsi Jakarta dan terendah di jawa timur pada tahun 2010 dengan angka 65,36%. Koridor Jawa diangka tertinggi rata-rata Indeks Pembangunan Manusia dimana angka tersebut diatas angka rata-rata nasional dalam 13 tahun penelitian.
- 4) Variabel Inflasi tertinggi di provinsi banten pada tahun 2014 dengan angka pada 10,20 dan terendah pada tahun 2019 dengan angka 0,21 pada provinsi yang sama. Di koridor Jawa memiliki rata-rata inflasi yang terjadi selama tahun 2009-2021 sebesar 4,02 dimana angka ini lebih rendah dari angka nasional pada tahun 2009-2021.
- 5) Variabel PMTB angka tertinggi di provinsi Jakarta pada tahun 2019 dengan angka 747.263.480,87 dan terendah di Provinsi Banten tahun 2009 di angka 2.366.615 dan rata-rata mencapai angka 262.653.858,83 selama kurun waktu 13 tahun penelitian.

- 6) Variabel IP_TIK tertinggi berada diprovinsi Jakarta pada tahun 2009 diangka 9,80 dan terendah di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2009 diangka 3,07 dan rata-rata mencapai angka 5,60 selama kurun waktu 13 tahun penelitian.
- 7) Variabel Gini Ratio (ketimpangan pendapatan) dipulau jawa pada tahun 2009-2021 terjadi fluktuasi turun naik dengan angka terendah 0,319 provinsi Jawa Tengah tahun 2009 dan angka tertinggi diprovinsi Yogyakarta tahun 2018 dengan angka 0,441 sedangkan rata-rata diangka 0.393 dalam jangka 13 tahun.



Gambar 1. Gini Ratio Pulau Jawa Tahun 2009-2021

Sumber: diolah.2023

Persamaan Penelitian

$$\log \text{Ketimpangan pendapatan}_{Jawa t} = \alpha_{it} + \beta_1 \log \text{Kepadatan Penduduk}_{Jawa t} + \beta_2 \log \text{Pengangguran}_{Jawa t} + \beta_3 \log \text{Inflasi}_{Jawa t} + \beta_4 \log \text{IPM}_{Jawa t} + \beta_5 \log \text{PMTB}_{Jawa t} + \beta_6 \log \text{IP_TIK}_{Jawa t}$$

Hasil pengujian untuk menentukan penggunaan model terbaik menunjukkan Prob Uji Chow sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga model yang terbaik adalah FEM (*Fix Effect Model*), pengujian dengan Uji Hausman menunjukkan nilai $0,0000 < 0,05$ sehingga model yang terbaik adalah FEM (*Fix Effect Model*). Berdasarkan dua pengujian tersebut

makan Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah FEM (*Fix Effect Model*).

Hasil pengujian koridor Jawa (tabel 1) dimana variabel kepadatan penduduk (X_1), pengangguran (X_2), IPM (X_3), inflasi (X_4), PMTB (X_5) dan IP_TIK (X_6) terlihat memiliki angka Prob (F-statistic) sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti adanya pengaruh signifikan semua variabel secara simultan terhadap Ketimpangan pendapatan (Y).

Tabel 1. Hasil Analisis FEM

Dependent Variable: JAWA_LOG_KETIMPANGAN_PENDAPATAN
 Method: Panel Least Squares
 Sample: 2009 2021
 Periods included: 13
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 78

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JAWA_LOG KEPADATAN PENDUDUK	-0.070229	0.020427	-3.438015	0.0011
JAWA_LOG PENGANGGURAN	0.093005	0.018863	4.930532	0.0000
JAWA_LOG_IPM	1.615859	0.338114	4.779038	0.0000
JAWA_LOG_INFLASI	0.002341	0.013725	0.170550	0.8652
JAWA_LOG_PMTB	0.014246	0.011533	1.235206	0.2217
JAWA_LOG_IP_TIK	0.026729	0.046299	0.577315	0.5659
C	-3.397327	0.652748	-5.204652	0.0000

Effects Specification			
Period fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.015874	R-squared	0.744804
Mean dependent var	-0.407051	Adjusted R-squared	0.666947
S.D. dependent var	0.031627	S.E. of regression	0.018252
Akaike info criterion	-4.961041	Sum squared resid	0.019656
Schwarz criterion	-4.386971	Log likelihood	212.4806
Hannan-Quinn criter.	-4.731230	F-statistic	9.566364
Durbin-Watson stat	1.153493	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: diolah.2023

Persamaan penelitian adalah sebagai berikut :

$$\text{Ketimpangan pendapatan}_{Jawa} = -3,397327 - 0,070229 \text{ KepadatanPenduduk}_{Jawa} + 0,093005 \text{ Pengangguran}_{Jawa} + 1,615859 \text{ IPM}_{Jawa} + 0,002341 \text{ Inflasi}_{Jawa} + 0,014246 \text{ PMTB}_{Jawa} + 0,026729 \text{ IP_TIK}_{Jawa}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan (tabel 1), maka secara parsial variabel kepadatan penduduk (X_1), Pengangguran (X_2) dan IPM (X_3), memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam lingkup pulau Jawa. Sedangkan Inflasi (X_4), PMTB (X_5) dan IP_TIK (X_6) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan secara parsial dalam lingkup pulau Jawa.

Hasil pengujian koridor Jawa (tabel 1) menunjukkan bahwa arah hubungan antara

variabel terhadap ketimpangan pendapatan di koridor Jawa adalah sebagai berikut

- a. Arah hubungan Kepadatan Penduduk (X_1) terhadap ketimpangan pendapatan (Y) sebesar $-0,070229$ atau arah hubungan negatif dan pengaruh inelastis. Ketika ada peningkatan dalam kepadatan penduduk di pulau Jawa akan menyebabkan penurunan inelastis pada ketimpangan pendapatan
- b. Arah hubungan Pengangguran (X_2) terhadap ketimpangan pendapatan (Y) sebesar $0,093005$ atau arah hubungan positif dan pengaruh inelastis. Ketika ada peningkatan dalam Pengangguran di pulau Jawa akan menyebabkan peningkatan inelastis pada ketimpangan pendapatan.
- c. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_3) terhadap ketimpangan pendapatan (Y) sebesar $1,615859$ atau arah hubungan positif dan pengaruh elastis. Ketika ada peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia di pulau Jawa akan menyebabkan peningkatan Elastis pada ketimpangan pendapatan
- d. Hubungan Inflasi (X_4) terhadap ketimpangan pendapatan (Y) sebesar $0,002341$ atau arah hubungan positif dan pengaruh inelastis. Ketika ada peningkatan dalam Inflasi di pulau Jawa akan menyebabkan peningkatan inelastis pada ketimpangan pendapatan
- e. Hubungan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) (X_5) terhadap ketimpangan pendapatan (Y) sebesar $0,014246$ atau arah hubungan positif dan pengaruh inelastis. Ketika ada peningkatan dalam PMTB di pulau Jawa akan menyebabkan peningkatan inelastis pada ketimpangan pendapatan
- f. Hubungan IP_TIK (X_6) terhadap ketimpangan pendapatan (Y) sebesar $0,026729$ atau arah hubungan positif dan pengaruh inelastis. Ketika ada peningkatan dalam IP_TIK di pulau Jawa

akan menyebabkan peningkatan inelastis pada ketimpangan pendapatan

Besaran pengaruh secara parsial dalam lingkup koridor Jawa sesuai urutan pengaruhnya dari terbesar pengaruhnya sampai terkecil pengaruhnya adalah 1) Pengangguran (X_2) sebesar $4,930532$, 2) IPM (X_3) sebesar $4,779038$, 3) Kepadatan Penduduk (X_1) sebesar $3,43801$, 4) PMTB (X_5) sebesar $1,235206$, 5) IP_TIK (X_6) sebesar $0,577315$ dan pengaruh terkecil adalah Inflasi (X_4) sebesar $0,170550$.

Pengaruh dari variabel penduduk (X_1), pengangguran (X_2), IPM (X_3), Inflasi (X_4), PMTB (X_5) dan IP_TIK (X_6) terhadap ketimpangan pendapatan (Y) pada pulau Jawa yang telah terbukti memiliki pengaruh signifikan dapat diketahui besaran nilainya dengan melihat angka R^2 . Berdasarkan hasil pengujian besaran nilai R^2 adalah $0,744804$ dan Adj R^2 adalah $0,666947$. Hal ini berarti besarnya pengaruh semua variabel secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan (Y) koridor Jawa sebesar $66,6947\%$, dan sisa angka sebesar $33,3053\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor terbesar yang mempengaruhi ketimpangan secara parsial di pulau Jawa adalah Pengangguran dengan arah hubungan positif dimana ketika pengangguran bertambah maka ketimpangan pendapatan akan semakin meningkat. Faktor terbesar berikutnya adalah IPM dengan arah hubungan positif, hal ini menjadi temuan penelitian bahwa IPM yang semakin meningkat akan meningkatkan pula ketimpangan pendapatan, peneliti melihat bahwa terjadi kesenjangan pendapatan bagi pekerja dengan pendidikan tinggi dan pekerja pendidikan rendah sehingga semakin terjadi jurang pemisah antar pekerja. Ketika seorang memiliki keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja maka ia akan terpakai bahkan dengan pendapatan terbaik dan sebaliknya ketika individu tidak memenuhi keterampilan

yang dibutuhkan dunia kerja maka pendapatannya terbatas, hal-hal inilah yang menyebabkan merubahan pada ketimpangan pendapatan.

Saran

Faktor yang memiliki pengaruh signifikan dan elastis terhadap ketimpangan pendapatan adalah variabel IPM sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pengambil kebijakan karena melihat arah hubungan yang positif. Jika pengambil kebijakan fokus meningkatkan pada angka IPM tanpa menyediakan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja maka ketimpangan pendapatan akan semakin meingkat.

indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 141–150.

[10] Pendapatan, T., Daerah, A., Di, P. A. D., & Magelang, K. (2019). 338 / *DINAMIC: Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019. 1*, 338–347.

[11] Rahmatulloh. (2017). *Dinamika Kependudukan di Ibukota Jakarta (Deskripsi Perkembangan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Penduduk di DKI Jakarta)*. *Genta Mulia*, VIII(2), 54–67.

[12] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development: The Addison-Wesley series in economics*.

[13] Wan, G., Wang, C., & Zhang, X. (2021). The Poverty-Growth-Inequality Triangle: Asia 1960s to 2010s. *Social Indicators Research*, 153(3), 795–822. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02521-6>

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 1(1), 1–11.
- [2] Basuki, A. T. (2019). *Aplikasi VECM Dalam Ekonomi*. 1–28.
- [3] Belakang, I. L. (2003). *Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Variabel Makroekonomi di Indonesia*. 323–342.
- [4] Booth, A. (2019). Measuring poverty and income distribution in Southeast Asia. *Asian-Pacific Economic Literature*, 33(1), 3–20. <https://doi.org/10.1111/apel.12250>
- [5] BPS. Statistik Indonesia.2023
- [6] Brandler, S., & Roman, C. P. (2020). Introduction to Panel Data Analysis: Concepts and Practices. *Handbook of Research Methods in Public Administration*, 605–624. <https://doi.org/10.1201/9781420013276-43>
- [7] <https://regional.kompas.com/read/2022/02/16/230327578/daftar-5-pulau-terbesar-di-indonesia-nomor-dua-tempat-ibu-kota-negara?page=all>
- [8] <https://www.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- [9] Oksamulya, A., & Anis, A. (2020). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN